

PENGARUH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PENGEMBANGAN *CIVIC DISPOSITION* SISWA SMA N SE-KOTA BANDAR LAMPUNG

Erwin Susanto

Email: susantoewin@yahoo.com

ABSTRACT

This study purposed to describe how's the influence of Civics learning towards civic disposition development of students as the city of Bandar Lampung. This research used in this research is a quantitative approach with survey methods and correlational. The results showed that the learning Civics is positively significant affect on student's civic dispositions at Senior High School in Bandar Lampung City.

Keywords: civic learning, civic disposition

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimanakah pengaruh pembelajaran PPKn terhadap pengembangan *civic disposition* siswa SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn berpengaruh positif signifikan terhadap *civic dispositions* siswa SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung

Kata kunci: pembelajaran PPKn, civic disposition

PENDAHULUAN

Memiliki watak warganegara (*civic disposition*) yang baik merupakan salah satu komponen yang penting bagi setiap warga negara. Membangun watak warganegara (*civic disposition*) merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga eksistensi suatu bangsa atau negara. Maka, tidaklah mengherankan jika diawal kemerdekaan, Presiden Soekarno telah menekankan prinsip berdaulat politik, berdiri di kaki sendiri (berdikari) dalam ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan. Akan tetapi hingga saat ini karakter warganegara belum menunjukkan karakter yang baik, seperti banyaknya perilaku warganegara yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan norma yang sesuai dengan kepribadian bangsa ini.

Megawangi (2004:6) mengatakan bahwa rendahnya kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional adalah cerminan dari perilaku individu-individu yang tidak berkarakter, sehingga berdampak negatif terhadap pengelolaan negara, korporasi, sistem hukum, yang akhirnya akan menurunkan daya saing Indonesia, dan seterusnya membuat Indonesia terpuruk secara sosial, ekonomi, dan budaya. Sebenarnya, semua masalah bangsa tersebut bermula dari sebuah kualitas karakter. Krisis multidimensi sebenarnya berakar pada rendahnya kualitas moral bangsa yang ditandai dengan membudidayanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), konflik (antar etnis, agama, politisi, remaja, dan antar daerah), meningkatnya kriminalitas, menurunnya etos kerja, dan banyak lagi. Budaya korupsi yang merupakan praktik pelanggaran moral (ketidakjujuran, tidak bertanggung jawab, rendahnya disiplin, rendahnya komitmen kepada nilai-nilai kebaikan), adalah penyebab utama negara kita sulit untuk bangkit dari krisis ini.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan mengacu pada berbagai macam aktivitas, mulai dari yang sifatnya produktif-material sampai kreatif-spiritual, mulai dari proses peningkatan kemampuan teknis (*skill*) sampai pada pembentukan kepribadian yang kokoh dan integral. Sebuah kegiatan yang mampu mengembangkan karakter anggotanya.

Pendidikan mengembangkan karakter melalui berbagai macam kegiatan, seperti penanaman nilai, pengembangan budi pekerti, nilai agama, pembelajaran dan pelatihan nilai-nilai modal dan lain-lain. Sebagaimana digariskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas : 62) pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam membangun watak kewarganegaraan atau *civic disposition* peserta didik sehingga dapat menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Terkait dengan peran pendidikan tersebut, tentunya sekolah yang menjadi tempat atau wadah untuk untuk mengembangkan atau membangun *civic disposition* siswa melalui pembudayaan karakter di lingkungannya. Sebuah budaya menggambarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya tanpa merasakan beban sedikitpun untuk melaksanakannya. Oleh karenanya, dalam merancang budaya sekolah harus diperhatikan komponen-komponen yang berada dalam lingkungan sekolah agar dalam proses pendidikan tidak dirasakan sebagai beban.

Karakter kewarganegaraan (*Civic Disposition*) merupakan sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinyasistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum. Branson (1999: 23) menegaskan bahwa *civic dispositions* mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak-watak warganegara sebagaimana kecakapan warganegara, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civic society*. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga sangat penting. Kepedulian sebagai warganegara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, kemauan untuk mendengar, serta negoisasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses.

Selanjutnya, dalam mengembangkan *civic disposition* di perguruan tinggi, PPKn sebagai program kurikuler mempunyai peran strategis untuk menanamkan pada siswa intisari dari *civic disposition* yang didalamnya terkandung karakter privat yakni tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga sangat

penting. Kepedulian sebagai warganegara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, kemauan untuk mendengar, serta negoisasi dan berkompromi. Serta menanamkan nilai karakter kepada siswa sehingga dapat menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berikir kritis dan bertindak esuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan memperhatikan sejumlah komponen belajar mengajar secara tepat, meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat dan sumber, serta evaluasi akan menunjang suasana pembelajaran yang senantiasa membelajarkan tiga kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu; *Pertama*, pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang terkait dengan materi inti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan antara lain demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani (*civil society*); dan *Kedua*, kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintah. *Ketiga*, watak kewarganegaraan (*civic dispositions*) antara lain pengakuan kesetaraan, toleransi, kebersamaan, pengakuan keragaman, kepekaan terhadap masalah warga negara antara lain masalah demokrasi dan hak asasi manusia.

Disinilah letak Pendidikan Kewarganegaraan dalam paradigma baru yang mengusung tujuan utama, yaitu mengembangkan *civic competences* yakni *civic knowledge* (pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan), *civic disposition* (nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan), *civic skills* (perangkat keterampilan intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan) yang seyogyanya dikuasai oleh setiap individu warga negara (Winataputra, 2001: 317-318).

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengaruh pembelajaran PPKn dalam usaha untuk membangun *civic dispositions* siswa. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran PPKn dalam membangun *civic dispositions* siswa. Untuk itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan tema “Pengaruh pembelajaran PPKn dalam pengembangan *civic disposition* siswa SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada pendahuluan mengenai pembelajaran PPKn terhadap pengembangan *civic dispositions*, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh positif signifikan pembelajaran PPKn terhadap pengembangan *civic disposition* siswa?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum penelitian ini secara bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh pembelajaran PPKn terhadap pengembangan *civic dispositions* siswa di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis dan menemukan apakah terdapat pengaruh signifikan pembelajaran PPKn terhadap pembentukan *civic dispositions* siswa SMA se-Kota Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Sesuai dengan pendapat

tersebut, Sugiyono (2012:11) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif cocok digunakan untuk pembuktian/konfirmasi.

Menurut Creswell dalam Isnandar (2011:69) bahwa

Quantitative research is a type of educational research in which the researcher decides what to study; asks specific, narrow questions; collects quantifiable data from participants, analyzes these number using statistic; and conducts the inquiry in an unbiased, objective manner.

Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian pendidikan dimana peneliti menentukan apa yang akan dipelajari; menanyakan hal yang spesifik; pertanyaan yang terbatas; pengumpulan data yang dapat diukur dari partisipan; menganalisis data dengan menggunakan statistik; dan menyelidiki perilaku tanpa memihak, sikap objektif.

Partisipan dalam penelitian ini adalah Siswa kelas XI SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung dari beberapa sekolah yang telah ditentukan sebagai sampel. Untuk lebih jelasnya jumlah partisipan dalam penelitian ini, akan disajikan dalam tabel di bawah ini.

No	Nama Kecamatan	Nama Sekolah	Jumlah Sampel
1	Tanjung Karang Pusat	SMA N 03 Bandar Lampung	27
2	Tanjung Karang Barat	SMA N 09 Bandar Lampung	27
3	Tanjung Karang Timur	SMA N 01 Bandar Lampung	27
4	Kemiling	SMA N 07 Bandar Lampung	27
5	Rajabasa	SMA N 13 Bandar Lampung	26
6	Sukarame	SMA N 05 Bandar Lampung	27
7	Tanjung Senang	SMA N 15 Bandar Lampung	26
8	Teluk Betung Barat	SMA N 11 Bandar Lampung	26
JUMLAH			213

Lokasi penelitian ini berada di Kota Bandar Lampung, Ibu Kota Propinsi Lampung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Sedangkan analisis data meliputi tabulasi data penelitian, uji normalitas, uji linieritas, uji homogenitas dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarikan kepada siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri se-Kota Bandar Lampung, penulis memperoleh data mengenai pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan hasil sebagai berikut: bahwa skor aktual yang diperoleh dari sepuluh pernyataan yang diajukan sebesar 8486. Nilai ini akan dibandingkan dengan skor ideal yang dicapai sebesar 10650. Dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal yang dicapai tersebut diperoleh nilai persentase sebesar 79,68%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 68,01% - 84% dan berada dalam kategori baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa-siswi SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung sudah dilakukan dengan baik.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap pengembangan *civic disposition* siswa SMA Negeri Se-Kota Bandar Lampung dengan nilai korelasi sebesar 0,401 dan pengaruhnya sebesar 16%.

Menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang dapat membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adanya hubungan antara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pengembangan *civic disposition*, dapat dipahami bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”.

Menurut Budimansyah (2008: 180), bahwa konfigurasi atau kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: *Pertama*, Pkn secara kurikuler dibangun sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. *Kedua*, Pkn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara pragmatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content-embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep dan moral Pancasila serta kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara.

Melalui visi, misi dan tujuan PKn menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 37 ayat (1) diketahui bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi, misi dan tujuan. Visi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warganegara. Misi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warganegara yang baik, yakni warganegara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara, dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum dan kesadaran moral.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Sumantri (2001) dalam Wahab dan Sapriya (2011: 312) dirinci dalam tujuan kurikuler yang meliputi: (a) ilmu pengetahuan yang mencakup fakta, konsep, dan generalisasi; (b) keterampilan intelektual yang mencakup keterampilan sederhana sampai keterampilan kompleks,

dari penyelidikan sampai kesimpulan yang shahih, dari berpikir kritis sampai berpikir kreatif; (c) sikap yang mencakup nilai, kepekaan, dan perasaan; (d) keterampilan sosial.

Sejalan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Wahab dan Sapriya (2011: 311), yang menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada umumnya adalah “untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizen*)”. Dijelaskan lebih mendalam oleh Wahab (1996) dalam Wahab dan Sapriya (2011:311), mengatakan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya, memiliki sikap disiplin pribadi, mampu berpikir kritis kreatif, dan inovatif agar dicapai kualitas pribadi dan perilaku warga negara dan warga masyarakat yang baik.

Lebih lanjut dijelaskan Budimansyah (2010), yang mengatakan ada beberapa kompetensi yang penting sebagai indikator seorang warganegara yang cerdas dan baik adalah: (1) memiliki kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global; memiliki kemampuan bekerja sama dengan orang lain dengan cara yang kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran/tugasnya di dalam masyarakat; (3) memiliki kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya; (4) memiliki kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis. Keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan; (5) memiliki keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan Kemampuan bersikap sensitif dan melindungi hak asasi manusia (misalnya, hak wanita, hak etnis minoritas, dan lain-lain); (6) memiliki keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ada komponen pembelajaran yang juga memberikan pengaruh dalam pengembangan *civic disposition* siswa, yaitu materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar dan evaluasi pembelajaran.

Materi Pembelajaran: Materi pembelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran (Djamarah dan Zaim, 2002:50) sehingga materi pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran tanpa materi pembelajaran, proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung. Materi pembelajaran dapat berupa fakta, konsep, prinsip maupun prosedur. Materi pembelajaran hendaknya lebih menitikberatkan pada pembinaan watak kewarganegaraan, pemahaman dan penghayatan nilai serta pengamalan Pancasila dan UUD 19 sebagai filsafat dan pandangan hidup bangsa, pembinaan siswa untuk melihat kenyataan, fokus belajar pada konsep yang benar menurut dan sesuai dengan Pancasila.

Metode Pembelajaran: Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya harus disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Untuk itu, keberhasilan pembelajaran PKn tidak hanya bergantung pada kemampuan guru dalam mengembangkan kompetensi dan materi pembelajaran saja, akan tetapi harus didukung oleh metode pembelajaran yang tepat. Pemilihan metode yang tepat

dalam pembelajaran PKn akan sangat membantu guru dan siswa dalam mencapai keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan.

Strategi dan metode dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu dikembangkan sesuai dengan pendekatan *field psychology*, yaitu strategi pembelajaran kontinum atau pembelajaran yang mengkombinasikan antara sudut ekstrem inkuiri dan sudut ekstrim ekspositori yang oleh Wetton dan Malan (1987) dikenal pula dengan sebutan *mixed instruction* (Wahab dan Sapriya, 2011: 343). Pemilihan strategi dan metode dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dirasakan sangat penting. Pendidikan Kewarganegaraan yang kental dengan *value based education* harus selektif dalam memilih strategi dan metode agar terdapat nilai-nilai yang bisa diambil dan diaplikasikan oleh siswa sebagai dampak pengiring.

Media Pembelajaran: Media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran (Djamarah dan Zain, 2002: 139). Selain hal tersebut, media pembelajaran dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terbentuknya proses belajar pada diri siswa. Kehadiran media sangat diperlukan untuk membantu memberikan kejelasan terhadap materi yang dipelajari, agar proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan.

Sumber Belajar: Sumber belajar pada hakikatnya ada pada lingkungan siswa seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemanfaatannya tergantung pada kreatifitas guru, waktu yang tersedia, biaya dan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Menurut Winataputra dan Ardiwinata (1991:165) bahwa setidaknya ada lima macam sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKn, yaitu meliputi: manusia, buku/kepustakaan, media massa, lingkungan (lingkungan alam, lingkungan sejarah atau lingkungan masyarakat) dan media pendidikan. dengan demikian media pembelajaran PKn dapat berupa: pesan, kelompok manusia, bahan bacaan (buku, koran, majalah dll), alat (lembaga-lembaga negara), teknik dan latar/lingkungan masyarakat yang sesuai dengan materi pembelajaran PKn yang dapat menunjang terwujudnya tujuan PKn.

Evaluasi Pembelajaran: Evaluasi pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan (Depdiknas, 2003:20). Menurut Djahiri (2005:2) evaluasi pendidikan kewarganegaraan merupakan momentum atau instrumen untuk mengukur/menilai tingkat keberhasilan, kegagalan, kelebihan atau kekurangan proses dan hasil belajar serta momentum untuk melakukan *relearning* yang bersiat kontinyu, multidimensional dan terbuka.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn dari titik minimal ke titik maksimal, dapat dilakukan dengan merealisasikan empat pilar pendidikan yang direkomendasikan oleh UNESCO tahun 1996 yang meliputi: *learning to know, learning to do, learning to live together* dan *learning to be*. (Wahab & Sapriya, 2008). Keempat pilar tersebut secara bebas dapat diartikan bahwa seorang pembelajar ketika melakukan proses pembelajaran, pertama-tama ia akan belajar untuk mengetahui (*to know*) untuk apa ia belajar dan bagaimana caranya belajar. Setelah itu maka ia akan mampu untuk melakukan (*to do*) proses pembelajarannya

sendiri. Sebagai hasil dari proses pembelajarannya tersebut, maka ia pun akan belajar untuk menjadi (*to be*) sosok yang diinginkannya, dengan segenap kompetensi yang dimilikinya. Dengan demikian, ia akan dapat hidup bersama (*learning to live together*)-berkolaborasi-dengan orang lain, karena kompetensi yang dimilikinya akan bermanfaat untuk kehidupannya dan orang lain.

Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di lapangan, maka tentunya keempat pilar tersebut dapat diurutkan dan dimaknai sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut: (1) *learning to know*, yang dapat diartikan bahwa siswa diupayakan agar dapat meningkatkan interaksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik, sosial maupun lingkungan budaya sehingga mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya sendiri; (2) *learning to do*, bahwa dalam pembelajaran tidak seharusnya memposisikan siswa sebagai pendengar ceramah guru, tetapi siswa harus diberdayakan agar mampu berbuat untuk memperkaya pengalamannya; (3) *learning to be*, yang dapat diartikan bahwa hasil interaksi siswa dengan lingkungannya itu dapat membangun pengetahuan dan kepercayaannya dirinya. (4) *learning to live together*, yang dapat diartikan bahwa siswa diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai individu dan kelompok yang bervariasi akan membentuk kepribadian yang baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil simpulan bahwa Pembelajaran PKn berpengaruh positif signifikan terhadap pengembangan *civic dispositions* siswa SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung. Hubungan antara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pengembangan *civic disposition*, hal ini dikarenakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia melalui koridor "*value-based education*". Pembelajaran merupakan *core activity* dalam kegiatan di sekolah, guru harus cerdas dalam memilih dan memilah materi, media, metode, strategi dan penilaian pembelajaran mana yang nantinya akan diterapkan di dalam kelas guna mengembangkan *civic disposition* siswa.

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, berikut implikasi dan saran yang dapat peneliti berikan. Walaupun mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembentukan *civic disposition*, kualitas pembelajaran PKn hendaknya selalu ditingkatkan, baik materi, metode, media, sumber belajar maupun evaluasi pembelajaran sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pembentukan *civic disposition*. Untuk itu, pembelajaran PKn hendaknya menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif sehingga siswa dapat belajar dalam suasana nyaman, inspiratif dan penuh semangat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman. (2010). *Esensi praktis belajar & pembelajaran*. Bandung: Humaniora
- Adnan, M. Fachri. (2005). Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) pada era demokratisasi. *Jurnal. Demokrasi* 1(4), hlm. 71-74
- Ali, Mohammad. (1987). *Penelitian pendidikan dan prosedur strategi*. Bandung: Angkasa.
- Arifin. (2011). Implementasi nilai budaya sekolah dalam mewujudkan sekolah berkualitas. hlm, 1-5

- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Prosedur penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmara, U.H, (2011). *Penulisan karya ilmiah*. Pontianak: Fahrana Bahagia
- Aswandi. (2010). Membangun bangsa melalui pendidikan berbasis karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter Publikasi Umum Pendidikan Umum & Nilai 2* (2). hlm 20.
- Aunurrahman. (2010). *Belajar dan pembelajaran*. Bandung: Alfabeta
- Beare, Hedley et.al. (1994). *Creating an Excellent School, Some New Management Techniques*, Routledge, London and New York.
- Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: CCE.
- Budimansyah, D. & Bestari, P. (2011). *Aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam membangun karakter warga negara*. Bandung: Widya aksara Press.
- Budimansyah, D. (2007). Pendidikan demokrasi sebagai konteks Civic Education di negara-negara berkembang. *Jurnal Acta Civicus*, 1 (1), hlm. 11-26
- Budimansyah, D. (2010) *Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Cholisin. (2010). Artikel. Penerapan *civic skills* dan *civic dispositions* dalam mata kuliah prodi PKn. Disampaikan dalam diskusi terbatas jurusan PKn dan Hukum FISE, UNY, 25 September 2010.
- Creswell. (2012) *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan dan Perpustakaan. (2003). *Sistem pendidikan nasional (undang-undang RI no.20 tahun 2003)*. Jakarta: Fokus Media.
- Djamarah, S. B & Zaim, A. (2002). *Strategi belajar mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fitriani. (2013). Budaya sekolah untuk meningkatkan prestasi akademik. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan 1* (10), hlm. 1-2
- Hadi, Sutrisno. (1989). *Metode research*. Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta.
- Hamalik, Oemar. (2011). *Proses belajar mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hamalik. (2006). *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Bumi Aksara
- Hasan Sadeli, Elly dan Kartika Wati, Ratna. (2013). Artikel. Peran pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada siswa SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto.
- Hoskins, Bryony dan Deakin Crick, Ruth. (2008). Learning to learn and civic competence: different currencies or two sides of the same coins?. *JRC Scientific and Technical Reports*, hlm. 7
- Kemdiknas. (2010). *Desain induk pendidikan karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Komalasari, K. (2008) *Pengaruh pembelajaran kontekstual dalam Pkn terhadap kompetensi kewarganegaraan siswa SMP*. Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- Komalasari, K. (2010). *Pembelajaran kontekstual: konsep dan aplikasi*. Bandung: Refika Aditama
- Kurnia, Adi dan Qomaruzzaman, Bambang. (2012). *Membangun budaya sekolah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Lickona, Thomas. (2004). *Make your school a school of character in Character Matters*. Tersedia di <http://www.cortland.edu/character/>, diakses 30 Desember 2012
- Majid, Abdul. (2011). *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Malik H, (2011). *Penelitian kualitatif*. Tersedia :<http://edukasi.kompasiana.com>
Diakses pada 20 Juni 2014.
- Malo, Manase. (1989). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Rajawali Kurnia
- Megawangi, Ratna. (2004). *Pendidikan karakter : Solusi yang tepat untuk membangun bangsa*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation,
- Moleong, L. J. (2003). *Metode penelitian kualitatif. edition indonesia language*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mustari, Muhammad. (2013). Budaya sekolah pada sekolah menengah pertama di Indonesia, *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang*, hlm 1-2
- Natsir, Mohammad. (1999). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Priyanto, Eko. (2014). Improving democratic values in civic education learning through grouped-discussion method for the students in higher education institutions, *Educare: International Journal for Educational Studies* 6(2), hlm 185-186.
- Quigley, C. N., Buchanan, Jr. J. H., Bahmueller, C. F. (1991). *Civitas: A Framework for Civic Education*, Calabas: Center for Civic Education.
- Rosyada, Dede, dkk. 2003. *Pendidikan kewarganegaraan, demokrasi, HAM dan masyarakat madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Ruhani. (2009). Budaya sekolah: Implikasi terhadap proses pembelajaran secara mengalami. *Jurnal Kemanusiaan*. hlm, 1-3
- Sagala, Syaiful. (2009). *Konsep dan makna pembelajaran*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sanjaya, Wina, (2009). *Kurikulum dan pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soemanto, W. (2006). *Psikologi pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudjana. 1989. *Metode statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sudrajat, Akhmad. (2010). *Kedisiplinan siswa di sekolah*. Tersedia: <http://www.duniaedukasi.net/2010/05/kedisiplin-siswa-di-sekolah.html>.
Diakses 20 Juni 2014.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (Pendekatan kuantitatif kualitatif. R & D)*. Bandung: Alfabeta
- Sumantri, M. dan Syaodih, S. (2007). *Perkembangan peserta didik*. Jakarta: Depdiknas.
- Sumarsono, dkk. (2004). *Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Suryosubroto. (2009). *Proses belajar mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Winataputra, U. S. & Ardiwinata. (1991). *Materi pokok perencanaan pembelajaran*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Witarsa. (2011). Pengaruh kinerja kepemimpinan pendidikan berbasis nilai terhadap pengembangan budaya sekolah di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia, *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 12 (1), hlm 87
- Wiyani, Novan Ardy. (2012). *Manajemen pendidikan karakter*. Yogyakarta: Pedagogia.
- Yuliono, Agus. (2011). Pengembangan budaya sekolah berprestasi: Studi tentang penanaman dan etos berprestasi di SMA Karangturi, *Jurnal Komunitas: Research and Learning in Sociology and Anthropology* 3 (2), hlm 1.